

## DAFTAR PUTAKA

### A. Literatur

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, dan Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2015.
- Alam, Wawan Tunggal, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, 2001.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Pres, Yogyakarta, 2011.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ariman, H.M. Rasyid, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Unsri Press, Palembang, 2007.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2014.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Daurus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, 2017.
- Djaja, Ermansjah, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ekaputra, Mohammad, dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2016.
- Fahrojih, Ikhwab, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Yappika dan Malang Corruption Watch (MCW), Jakarta, 2005.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. Djambatan, Jakarta, 1999.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, 2008.

- Lopa, Baharuddin, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih, Jakarta, 1997.
- Makawimbang, Harnold Ferry, *Kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum. Cet. 2*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nurdjana, IGM., *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum Alumni*, Bandung, 1982.
- Purnomo, Bambang, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2003.
- Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Ramelan, *Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Diklat MA. R.I. Jakarta, 2001.
- Salim, H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoriti, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Mataram, 2015.
- Setiawan, Yudhi, *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

- Sianturi, S.R. , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Keempat, Jakarta, Alumni, 1996.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuat Akta*, Mandar Maju, Surabaya, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Sumardjono, Maria S. W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan 2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Syah, Mudakir Iskandar, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan 1, Jala Permata, Jakarta, 2007.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Widjajanti, Ermania, dan Septa Candra, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

## **B. Undang-Undang dan Putusan Pengadilan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg.

### C. Kamus

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

### D. Jurnal

Abdullah, Nawaaf, dan Munsyarif Abdul Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2017.

Afifah, Kunni, ”Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017.

Aprilianti, Fajrina D., Yani Pujiwatib, Betty Rubiatic “Peran Notaris Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Pertanahan”, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

Ariesta, Fikri R., “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap” *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2018.

Buamona, Syahdi Syahri, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi”, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Volume 08, Nomor 2, Desember 2022.

Darmawan, I Gusti Agung Ketut, dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Batasan Larangan Pekerjaan Lain Notaris Ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 8, Nomor 03, Desember 2023.

Dyani, Vina Akfa, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017.

Effendi, Taufik, dan Handoyo Prasetyo, ”Penerapan Delik Penyertaan Terhadap Notaris/ Ppat Dalam Tindak Pidana Korupsi (*Application Of The Participation To Notary In Criminal Action of Corruption*)”, *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.

- Eskanugraha, Andika Putra dan Rizky Eka Safitri Wirawan, "Peran Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 13, Issue 2, November 2023.
- Fadlian, Aryo, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020.
- Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, Tinjauan Tentang Sistem Pidana dalam Perbarengan Tindak Pidana menurut KUHP, *Media keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2018.
- Gunarto, Putri, C. A., "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah", *Jurnal Akta*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2018.
- Haryanto, Agus Dwi, "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Kuasa Menjual", *Jurnal Bevinding*, Volume 01, Nomor 01, Tahun 2023.
- Ilham, Muhammad, "Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pengedar Narkoba" *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020.
- Ismaidar, "Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencapaian Tujuan Pidana", *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2018.
- Mandala, Marthinus Mesak, "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017", *Officium Notarium*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2021.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2017 -2018.
- Maron, Yogi, Ismansyah dan Azmi Fendri, "Notary's Responsibility In Making Of Deed Due To Land Acquisition Containing Criminal Corruption", *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Volume 05, Nomor 01, Januari-Juni 2020.
- Maulidia, Nina Khadijah, dan Gde Made Swardhana, "Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang", *ActaiComitasi: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2020.

- Mulyadi, Mahmud, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif (*Criminal Policy Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective*)”, *Jurnal Lesislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011.
- Oktavia, Winda dan Dhody AR. Widjajaatmadja, Amelia Nur Widyanti, Kepastian Hukum Pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN) Terkait Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Pratamaa, Brilian, Happy Warsitoa dan Herman Adriansyaha, Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris, *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Pratiwi, Ayu, “Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Officium Notarium*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2022.
- Purnayasa, A. T., “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2018.
- Purwanto, Konsep Pengembangan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia, *Risalah Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2009.
- Putra, Nandha Risky, dan Rosa Linda, “Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2022.
- Ramadhan, Eka Dadan, dan Eni Dasuki Suhardini, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2019.
- Ridwan, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 64, Th. XVI, Desember, 2014.
- Sabigin, Cecep Dudi Muklis, “Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Konstituen*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2021.
- Santoso, Agus, “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2020.

- Satria, Hariman, “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik”, *INTEGRITAS: Jurnal Anti korupsi*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2020.
- Selly, Shahananda, “Penegakan Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020)”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, Article 19, Tahun 2021.
- Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, dan Moh Ali, Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian, Volume 2, Issue 2, 2021.
- Setyowati, Ike Indra Agus, “Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelmening*) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018.
- Sidiq, Mochamad Elmo, Asep Sunarsa dan Amin Purnawan, “Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau”, *Jurnal Akta*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2018.
- Simarmata, Fransiscus Joel Robert, “Pelaksanaan Sanksi Bagi Pejabat Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume VIII, Nomor 2, April-Juni 2020.
- Subiyantana dan Nynda Fatmawati Octarina, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik”, *Jurnal Rechtsens*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020.
- Suryati, Desi dan Dwi Luspita Sari, Dwi Noviani, Administrasi Pengawasan Dalam Lembaga Pendidikan, *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, Vol.1, No. 1, 2023.
- Susanto, I.S., “Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru”, *Makalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, Edisi VII/Okttober-Desember, 1999.
- Suwitri, Sri, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi”, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2007.
- Syahputri, Nur Afni dan Nelfia Adi, Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai oleh Pimpinan di Kantor, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 4, Nomor 3, 2020.



- Syuraida, Hikmatus, “Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi”, *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2015.
- Tampubolon, Samuel Mangapul, Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, *Lex et Societatis*, Vol. II, No. 6, Juli, 2014.
- Tehupeiory, Aartje, “Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 1, Nomor 1, April 2015.
- Wahyu, Yuyu, “Perkembangan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 8, Nomor 1, Edisi: Januari-Juni 2014.
- Wattimena, Husin, “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Tahkim*, Volume XII, Nomor 2, Desember 2016.
- Wiradiredja, Hilda Sophia, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 32, Nomor 1, Februari 2015.
- Yuniastuti, Ary dan Jawade Hafidz, “Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris”, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017.